

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrah Muslimin, Zkthisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1978, Djambatan, Jakarta, 1960.

Amrizal J Prang, 2015, Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris, Biena Edukasi, Lhokseumawe,

Aidul Fitriciada Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi,

Agus Dwiyanto, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ringkasan Eksekutif;

Ahmad Sukardja, 2012, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002,

Cetakan Pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hlm.95-98.

Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta :PSH-FH UII.

B.N. Marbun, 2005, DPRD dan Otonomi Daerah (Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004), Sinar Harapan, Jakarta.

B.N. Marbun, DPRD dan Otonomi Daerah (Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004), Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Binfan R Samgih, Lemhaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988,

Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.

DR. Bahder Johan Nasution, SH.,SM.,M.Hum.,”
Metode Penelitian Ilmu Hukum,’ (Bandung: Cetakan ke- I 2008)

Dennis F.Thompson ditejemahkan oleh Benyarnin Mola, Political Ethics
and Public Wcer,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000,

Sayuti Una, 2004, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut
Konstitusi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie,SH,2008, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah,
Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*,Jakarta, Sinar Grafika,

Ni'matul Huda, ***Hukum Pemerintahan Daerah***, Cetakan Kedua, Nusa
Media, Bandung, 2010,

R.D.H.Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia*, Bina
Cipta, 1979,

. M.Nasroen, *Soul Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah
Otonom*, Endang,Jakarta, 1954,

Moh.Mahfud MD, Pergulatan Politik dan ***Hukum di*** Indonesia, Cetakan
Pertama, Gama Media,Yogyakarta, 1999,

Muhammad **Yamin**, ***Proklamasi dan Konstitusi Indonesia***, Cetakan
Keempat, Ghalia Indonesia,Jakarta, **1982**,

Moh.Mahfud MD, ***Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi***, **Cetakan Pertama,**
Gama Media,Yogyakarta, **1999**,

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah;Filosofi,,Sejarah Perkembangan dan
Problematika*, PustakaPelajar, Yogyakarta,

Soetjipto Wimsardjono, *Dialog dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang
Agama,Negara danReat*, Mizan, Bandung, 1995

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilrnu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kedua,
PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2010,

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Firdaus, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yang kini merupakan Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

B. Jurnal

Dedis Elvalina, “Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Volume II Nomor 2*, November 2016.

RA. Agus Abikusna, “ Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “, *Jurnal SOSFILKOM*, Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019, FISIP UMC, 2019.

Bayu Aji,” Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi,” *Jurnal Politik Hukum. Volume 02. Nomor .02 2017*

Risalah Proses Pembahasan RUU Tentang PEMDA 2014 dalam Rapat Kerja I Senin 2 April 2012.

Jorawati Simarmata,” Perspektif Kebijakan Daerah dalam Kontek UU.No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmu Hukum Nomor 01 Edisi Juni-September 2017*

C. Kamus

Sudarsono, 1992. Kamus Hukum. Rineka Cipta. Jakarta

Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat Depdiknas. Jakarta.

D. Artikel Internet

Akil Mochtar, Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah Di Era Otonomi, www.google.com, diakses tanggal 28 juli 2021

Diah Restuning Maharani, Teori Kewenangan ,
<http://restuningmaharani.com/>,diakses pada tanggal 28 Juli 2021

E. Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

-----Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

-----Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

-----Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587